

SKEMA BARU DIUSULKAN

Bisnis, JAKARTA — Skema satu harga nasional untuk gas petroleum (*liquified petroleum gas/LPG*) bersubsidi diusulkan guna menghindari permainan harga oleh oknum tertentu. Akan tetapi, hal tersebut dipandang tidak memberikan solusi terkait kecurangan yang acapkali terjadi.

M. Ryan Hidayatullah
redaksi@bisnis.com

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya akan memukul rata harga LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi di seluruh Indonesia.

Saat ini, imbuhnya, pihaknya tengah menggodok aturan terkait penetapan harga gas melon tersebut.

Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) No. 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg mengatur bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Hanya saja, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESMD dan BPH Migas.

Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

Namun, Bahlil menilai hal ini malah menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, imbuhnya, negara telah menggelontorkan dana subsidi puluhan triliun rupiah.

"Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran *gak* terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah. Ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," jelas Bahlil.

Dia memerinci bahwa telah pemerintah menggelontorkan biaya subsidi sebesar Rp80 triliun hing-

ga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pengaturan harga di tingkat penjual pun harus diatur sehingga penerima LPG 3 kg bisa tetap sasaran.

Selain itu, Bahlil memandang bahwa lewat pengaturan tersebut maka dana subsidi pun tak akan membengkak.

"Kalau harga dinaikkan terus, antara harapan negara dan apa yang terjadi tidak sinkron," ujarnya.

Bisnis mencatat bahwa penataan penjualan gas melon subsidi itu memang telah lama menjadi perhatian pemerintah. Hal ini lantaran kerap ada kecurangan dalam proses distribusi maupun penjualan.

Dalam kesempatan terpisah, Bahlil sempat mengatakan bahwa masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung.

Pasalnya, kata Bahlil, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung, sedangkan harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung.

Akan tetapi, saat ini harga LPG di setiap daerah dibanderol antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung.

Hanya saja, wacana pemerintah tersebut mendapatkan sorotan dari praktisi migas Hadi Ismoyo.

Dia menilai bahwa kebijakan tersebut kurang tepat. Pasalnya, dia memandang bahwa kebijakan ini tidak mendidik masyarakat luas terkait biaya logistik.

"Di mana *logistic cost* dari satu titik ke titik lainnya butuh biaya yang tidak sedikit. Siapa yang akan

menanggung *cost* logistiknya," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Selasa (2/7).

Menurutnya, saat ini daya beli masyarakat menurun lantaran ekonomi tumbuh lambat. Kebijakan populis, imbuhnya, seharusnya dapat membantu masyarakat bawah.

Namun, dia menilai bahwa kebijakan baru tersebut bisa menyebabkan derita bagi PT Pertamina (Persero). Pasalnya, perusahaan pelat merah itu kemungkinan akan membayar biaya logistik terlebih dahulu, dibayar kemudian, mirip mekanisme subsidi.

"Ruang fiskal kita juga terbatas, apakah mau ditambah lagi *cost logistic* di tanggung negara," jelasnya.

Selain itu, Hadi juga berpendapat kebijakan LPG 3 kg satu harga tidak menjamin dapat memberantas kecurangan di lapangan. Pasalnya, dia memandang bahwa akan selalu ada ketimpangan harga subsidi dan nonsubsidi.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan bahwa kecurangan peredaran gas melon di lapangan bisa diatasi dengan membangun sistem teknologi informasi.

Lewat strategi ini, imbuhnya, pengawasan data dan monitoring dilakukan Depo Pertamina, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, pangkalan, pengecer, konsumen, hingga pengembalian tabung.

"Dengan IT yang demikian berkembang pesat, peredaran tabung LPG 3 kg tersebut harusnya bisa di *mapping time to time*, jika tabung tersebut nyasar seharusnya bisa dideteksi. Tinggal niat mau membuat IT yang canggih apa tidak," katanya.

Untuk itu, Hadi pun menyarankan agar dapat memikirkan konversi LPG ke jaringan gas (*jar-gas*). Apalagi, imbuhnya, Indonesia juga memiliki pasokan gas yang



Ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga.

cukup melimpah.

"Kita punya cukup *resources gas*. Hanya diperlukan pembangunan infrastruktur gas yang *massive* dan terintegrasi," katanya.

PENGOPLOSAN

Di sisi lain, Kementerian ESMD mencatat bahwa ada 30 kasus pidana penyalahgunaan LPG 3 kg subsidi sepanjang Januari—Juni 2025.

Pt. Dirjen Migas Kementerian ESMD Tri Winarno mengatakan, modus penyalahgunaan gas melon itu dengan cara mengoplos.

Dia menjelaskan bahwa terdapat oknum yang memindahkan isi gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas nonsubsidi. Dengan begitu, oknum tersebut mendapat untung dengan menjual kembali gas LPG 3 kg sebagai gas nonsubsidi.

"Hasil koordinasi dengan para penegak hukum sampai dengan Juni 2025 tercatat sejumlah 30 kasus pidana berupa pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke dalam tabung nonsubsidi," jelasnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6).

Tri mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah melakukan pengawasan dan verifikasi distribusi LPG 3 kg setiap bulannya. Tercatat, pihaknya telah mengawasi dan verifikasi 1.865 agen hingga Mei 2025. Secara uji petik,

pihaknya mencatat sebanyak 123 agen penyalur.

Dia menambahkan bahwa realisasi distribusi LPG 3 kg tepat sasaran saat ini masih dalam tahap I atau pendataan pengguna.

Sementara itu, imbuhnya, status per 31 Mei 2025 terdapat 54,1 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat bertransaksi dalam sistem Merchant Apps Pangkalan Pertamina.

Menurutnya, seluruh NIK itu mencakup rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

Adapun, penyaluran LPG 3 kg telah mencapai 3,49 juta ton sampai dengan Mei 2025. Angka tersebut mencapai 42,7% dari kuota penyaluran LPG 3 kg tahun ini yang sebesar 8,17 juta ton.

"Proyeksi hingga akhir tahun 2026 diperkirakan akan mencapai 8,31 juta ton," ujarnya.

Di sisi lain, Bahlil mengusulkan alokasi untuk penyaluran BBM bersubsidi menjadi 8,31 juta ton dalam RAPBN 2026. Jumlah ini lebih tinggi dibanding target dalam APBN 2025 yang sebesar 8,17 juta ton.

Dia mengatakan realisasi penyaluran LPG 3 kg telah mencapai 3,49 juta ton per Mei 2025. Sedangkan, *outlook* penyaluran gas melon untuk tahun ini diperkirakan mencapai 8,36 juta ton atau melebihi kuota yang ditetapkan.

Bahlil pun berjanji melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Hal ini antara lain melalui pendataan pengguna LPG 3 kg yang lebih baik.

Menurutnya, pelaksanaan transformasi subsidi LPG 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. □



Realisasi Subsidi LPG di Indonesia 10 tahun terakhir

